

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem *good governance*, Dimana dalam sistem ini Negara Indonesia mengacu pada pertumbuhan pembangunan, Ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara. Dalam Penyelenggara Negara tak lepas dari masalah aksesibilitas laporan keuangan dan Sistem pengendalian interen terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah itu Sendiri. Karena aspek keuangan Negara menduduki posisi yang strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa. Apalagi dijamin reformasi yang berlangsung saat ini di Indonesia. Masyarakat selalu menuntut agar pemerintah mampu mengelola otonomi daerah dan sistem Pengelolaan keuangan daerah itu agar lebih baik. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk bagaimana mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. oleh karena itu, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi Pengelolaan keuangan daerah.

Demi terciptanya hal itu, pemerintah harus mampu menyediakan semua Informasi keuangan yang relevan, secara jujur dan terbuka kepada publik atau masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip

Keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan Akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam Upaya Mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan Setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik Secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Menurut Mardiasmo (2006), pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya suatu akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melakukan pertanggung jawaban atas laporan keuangan, karena pemerintah dikenal sebagai pelaku ekonomi yang besar dalam mengelola keuangan demi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pemerintah saat ini kurang efisien terhadap transparansi kepada masyarakat melainkan laporan keuangan tersebut hanya dipublikasikan dalam lingkungan pemerintah saja, padahal masyarakat berperan penting terhadap keterbukaan laporan kinerja pemerintah. Selain itu otonomi daerah juga masih dipahami secara sempit sehingga hanya pemerintah daerah yang aktif mengetahui sedangkan peran serta masyarakat luas belum terkena dampaknya.

Pentingnya transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah untuk meningkatkan kepercayaan. Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya dibandingkan pemerintah yang relatif tertutup. Medina and Rufin (2015) menjelaskan bahwa *"transparency does have both*

a direct effect on trust and an indirect effect that is mediated by satisfaction.”

pemerintah yang tertutup dengan informasi keuangan dapat dinilai warga memiliki macam-macam rahasia penyelewengan keuangan. Pemerintah menutup informasi keuangan dapat diduga kurang berkompeten dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Umumnya, pemerintah yang tertutup tidak dapat menjelaskan mengapa kinerja Pembangunan mereka buruk dan tidak berhasil.

Untuk meningkatkan transparansi penegelolaan keuangan daerah, diperlukan penyajian laporan keuangan yang berperan penting sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimana didalamnya terdapat transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang dilakukan selama periode pelaporan. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah harus menerapkan standar akuntansi yang berlaku umum untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dipahami oleh pengguna. Pemerintah juga wajib meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi laporan keuangan agar dapat memperoleh dari masyarakat.

Dalam meningkatkan kualitas serta keandalan laporan keuangan demi menciptakan transparansi pengelolaan kuangan, diperlukan sistem pengendalian yang memadai. Laporan keuangan yang dipublikasikan dapat dipercaya apabila merupakan hasil rancangan dari sistem pengendalian internal yang terarah dari suatu organisasi, berdasarkan pada peraturan pemerintah No 60/2018 Dijelaskan bahwa “sistem pengendalian interen merupakan suatu proses integral yang dapat menghasilkan keyakinan yang tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam kegiatan yang efektif seperti menjaga keamanan asset negara, mengevaluasi keandalan laporan keuangan dan mentaati peraturan perundang-undangan” proses

tersebut dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin serta pegawai. Tujuan dari pada sistem pengendalian intern ini dalam perusahaan yaitu menghindari penyimpangan prosedur operasional perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dipercaya dan dapat di pertanggungjawabkan.

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar peraturan pemerintah.

Untuk memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau lebih cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat. (2) memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian. (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat itu sendiri.

Penyajian laporan keuangan daerah tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelolah keuangan daerah yang tergolong besar. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu elemen dari pelaporan keuangan yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan pemerintah dalam melakukan

bentuk pelaporan keuangan daerah yang memadai. Karena penyebab terjadinya hubungan antara penyajian laporan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yaitu disebabkan dengan lemahnya bentuk penyajian laporan keuangan yang terbuka oleh pemerintah dalam hal transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas Laporan Keuangan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Karena Aksesibilitas Laporan Keuangan berasal dari individu masing-masing untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi pemerintahannya. Yang menyebabkan terjadinya hubungan antara Aksesibilitas Laporan Keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yaitu disebabkan dengan Ketidaktersediaan informasi laporan keuangan yang tidak terbuka, begitu pula dengan kualitas informasi laporan keuangan yang tidak baik. Oleh karena itu jika tingginya aksesibilitas laporan keuangan maka semakin tinggi pula pemerintah melakukan transparansi pengelolaan keuangan daerahnya, dan jika rendahnya Aksesibilitas Laporan Keuangan yang dimiliki maka akan mempengaruhi tingkat rendahnya pemerintah melakukan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dan semakin tinggi penyajian laporan keuangan daerah yang dimiliki pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerahnya, jika rendahnya penyajian laporan keuangan daerah yang dimiliki maka akan mempengaruhi tingkat rendahnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah sistem pengendalian intern. Sistem Pengendalian Internal (SPI) berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang Integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi pemerintahan, karena yang menyebabkan terjadinya hubungan antara sistem pengendalian internal dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah ketidak jujuran dan kejujuran pemerintah adalah ketika dalam proses menjalankan sistem yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah harus berdasarkan pada prosedur SPI nya, agar transparansi pengelolaan keuangan daerah bisa tercapai Secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dijelaskan bahwa semakin rendah sistem pengendalian internal (SPI) maka semakin rendah pula transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya sistem pengendalian internal dapat memengaruhi pengambilan keputusan Internal pemerintah daerah dan dapat berimplikasi pada transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan jika jeleknya sistem pengendalian internal yang dimiliki maka akan mempengaruhi tingkat Jeleknya transparansi pengelolaan keuangan daerahnya.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara variabel penyajian laporan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan daerah menjelaskan pengaruh antara variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem Pengendalian internal terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah yaitu menggunakan teori agensi yang mana menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik perusahaan.

Sumber daya dalam menjalankan perusahaan. Teori agensi berfokus pada biaya potensi konflik kepentingan antara pelaku dan agen, disebut sebagai *agency*

costs (biaya agensi). (Jensen dan Mecling, 1976). Implikasi teori agensi dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah SKPD sebagai pihak yang diberikan wewenang (agen) oleh pemerintah pusat (prinsipal) untuk mengelola keuangan daerah. Selain itu, masyarakat dalam hal ini Juga merupakan prinsipal, sehingga pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak hanya Kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada masyarakat.

Keuangan daerah merupakan dokumen publik yang berhak diketahui oleh Masyarakat. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan No 71 Tahun 2010 telah ditetapkan, Pemerintah daerah khususnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan daerah yang Berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan keuangan. Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan diatas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin melaksanakan melalui tata pemerintahan Yang baik (*good goverment*) yang memiliki beberapa karakteristik yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan

Masyarakat, (Endah et al, 2019). Sebagai mana dijelaskan di sebelumnya Bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, Penyelenggaran akuntansi dipemerintah daerah tidak cukup hanya memahami SAP

tetapi juga harus memahami dan/atau memperhatikan peraturan-peraturan yang Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, (terutama misalnya menyangkut Struktur APBD, mekanisme penatausahaan pelaksanaan APBD), sebagai mana diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 (revisi kedua).

Dalam mewujudkan Pemerintah yang baik serta wujud transparansi laporan Keuangan maka Pemerintah Daerah Kota Ternate telah menyusun laporan Keuangan yang berisi tentang laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan tersebut disusun Berdasarkan gabungan dari laporan keuangan seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate dan Informasi Keuangan yang berada dalam pengelolaan Kas Daerah. <https://penamalut.com>

Pemerintah kota Ternate merupakan salah satu *entitas* pelaporan yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada, oleh karena itu pemerintah kota Ternate harus mampu menunjukkan konsistennya terhadap penyusunan dan aksesibilitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Siti et al, 2017) Tentang Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan Keuangan daerah, terhadap transparansi dan aksesibilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama dalam penelitian ini menambah satu variabel yaitu sistem pengendalian interen.

Perbedaan kedua penelitian tidak meneliti tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah, perbedaan ketiga pada penelitian ini adalah lokasi dan tahun Penelitiannya. Penelitian yang di lakukan oleh Siti et al pada tahun 2017 dengan Variabel penelitiannya tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah, terhadap transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Jepara, sedangkan penelitian yang di Lakukan oleh peneliti adalah di Kota Ternate tahun 2022 dengan variabel penelitian Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Interen, Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang di lakukan Siti, et al pada lokasi tingkat kabupaten (Kabupaten Jepara), sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya pada lokasi tingkat Kota yaitu Kota Ternate.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Interen, Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (studi kasus : Pemerintah Kota Ternate).**

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas dapat diketahui beberapa permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini :

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah sistem pengendalian interen berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah!
2. Untuk mengetahui aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah!
3. Untuk mengetahui sistem pengendalian interen terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah!

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Akuntansi pada khususnya tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian interen

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam memahami Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian interenal terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, studi pada pemerintah Kota Ternate.

3. Manfaat Kebijakan

Menjadi bahan masukan bagi pembaca yang meneliti terkait Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian interen terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah